

PERBANDINGAN PENGATURAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE ANTARA UNI EROPA DAN INDONESIA

ABSTRAK

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence* (AI) di Indonesia saat ini melaju jauh lebih cepat dibandingkan proses pembuatan aturan hukumnya. Ketidadaan undang-undang khusus membuat Indonesia hanya bergantung pada aturan umum seperti UU ITE, yang memandang AI hanya sebagai alat bantu pasif dan bukan sistem pintar yang bisa bekerja sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaturan AI dalam hukum positif Indonesia terhadap penggunaan AI & mengkaji bagaimana sebaiknya pengaturan terkait dengan AI di masa mendatang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan dan konseptual. Hasil penelitian menemukan adanya kekosongan hukum yang di Indonesia ketika berhadapan dengan risiko AI otonom, seperti pada kasus kendaraan tanpa pengemudi atau manipulasi data. Berbeda dengan Uni Eropa, penelitian ini merekomendasikan Indonesia untuk menerapkan pendekatan campuran dalam Undang-Undang AI yang baru. Penulis mengusulkan kewajiban tanggung jawab penuh bagi produsen teknologi berisiko tinggi, namun tetap memberikan perlindungan inovasi melalui "Ruang Uji Coba Terbatas" (*Regulatory Sandbox*) dan konsep "Zona Aman" (*Safe Harbor*). Solusi ini diharapkan dapat menyeimbangkan keamanan masyarakat tanpa mematikan kreativitas pengembang teknologi nasional.

Kata Kunci: *Artificial Intelligence, EU AI Act, Regulatory Sandbox.*

A COMPARATIVE STUDY OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE REGULATIONS BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND INDONESIA

ABSTRACT

The development of artificial intelligence (AI) technology in Indonesia is currently progressing much faster than the process of creating its legal regulations. The absence of specific legislation leaves Indonesia relying solely on general regulations, such as the ITE Law, which views AI as merely a passive tool rather than an intelligent system that can operate autonomously. This study aims to identify and analyze the regulation of AI in Indonesian positive law regarding the use of AI and examine how AI-related regulations should be implemented in the future. The research method used is normative juridical with a comparative and conceptual approach. The results of the study found a legal vacuum in Indonesia when dealing with the risks of autonomous AI, such as in cases of driverless vehicles or data manipulation. Unlike the European Union, this study recommends that Indonesia implement a mixed approach in its new AI Law. The authors propose full liability obligations for producers of high-risk technology, while still providing innovation protection through a "Regulatory Sandbox" and the concept of a "Safe Harbor". This solution is expected to balance public safety without stifling the creativity of national technology developers.

Keywords: *Artificial Intelligence, EU AI Act, Regulatory Sandbox*